PENERTIBAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

Ni Putu Ayu Diah Prasdiatni Dewi

NPP. 32.0262

Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 32.0262@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Gradiana Tefa, S.STP., M.AP

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian): The regulation of beggars and homeless people (Gepeng) in Bengkulu City is one of the major challenges in maintaining public order and creating a disciplined and prosperous environment. The presence of Gepeng constantly occupying public spaces affects the comfort of the community and adds to the social burden. The Bengkulu City Government, through the Civil Service Police Unit (Satpol PP), has made efforts to regulate the presence of Gepeng with various policies and strategies. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of Gepeng regulation by Satpol PP in Bengkulu City, using the Control Theory by Eviany and Sutiyo with the dimensions of control efforts: (1) Action-Based Efforts, (2) Equipment Used, and (3) Objectives. **Method:** The research method used is a qualitative approach with interviews and field observations of Satpol PP personnel, the Social Service, and the community. **Result:** The findings indicate that the regulation of beggars and homeless people in Bengkulu City involves various strategies, including socialization with the community, increased patrols, and coordination between Satpol PP and the Social Service for counseling and social rehabilitation. The public is also encouraged to be more prudent in providing assistance to Gepeng through official institutions rather than giving money directly. However, this regulation faces significant challenges such as the limited availability of temporary shelters, the presence of Gepeng from outside the region, and the continued direct monetary assistance given by the public. **Conclusion:** This study concludes that the success of this regulation heavily depends on the synergy between the government, Satpol PP, the Social Service, and the community to create a more disciplined, safe, and prosperous environment, so that Bengkulu City can be free from vagrants and beggars.

Keywords: Regulation, Beggars and Homeless People, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) di Kota Bengkulu menjadi salah satu tantangan besar dalam menjaga ketertiban umum dan menciptakan lingkungan yang tertib dan sejahtera. Keberadaan gepeng yang terus-menerus berada di ruang publik mempengaruhi kenyamanan masyarakat dan menambah beban sosial. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah berupaya untuk menertibkan keberadaan gepeng dengan berbagai kebijakan dan strategi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penertiban gepeng oleh Satpol PP di Kota Bengkulu dengan menggunakan Teori

Penertiban Eviany dan Sutiyo dengan dimensi upaya penertiban : (1) Upaya Berupa Tindakan, (2) Perlengkapan yang Digunakan, dan (3) Tujuan. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara dan observasi lapangan terhadap aparat Satpol PP, Dinas Sosial, dan masyarakat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Bengkulu melibatkan berbagai strategi, termasuk sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan patroli, serta koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Sosial untuk pembinaan dan rehabilitasi sosial. Masyarakat juga diajak untuk lebih bijak dalam memberikan bantuan kepada gepeng melalui lembaga resmi, bukan dengan uang langsung. Namun, penertiban ini menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan fasilitas penampungan sementara, keberadaan gepeng dari luar daerah, serta masih banyaknya masyarakat yang memberi uang langsung kepada gepeng. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penertiban ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, Satpol PP, Dinas Sosial, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan sejahtera, agar Kota Bengkulu terbebas dari gelandangan dan pengemis.

Kata kunci: Penertiban, Gelandangan dan Pengemis, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai persoalan kesejahteraan sosial yang kompleks, salah satunya adalah meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) di berbagai wilayah. Gelandangan dan pengemis merupakan kelompok rentan yang hidup tanpa tempat tinggal tetap dan mengandalkan belas kasihan di ruang-ruang publik untuk bertahan hidup. Masalah ini bukan hanya mencerminkan kemiskinan ekstrem, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban umum, estetika kota, dan kenyamanan masyarakat¹. Faktor utama yang mendorong munculnya gepeng meliputi kemiskinan, namun munculnya gepeng tidak semata-mata disebabkan oleh kemiskinan yang bersifat ekonomi saja, melainkan juga dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, keterampilan, dan kesehatan yang buruk, serta kekurangan modal². Namun, akar permasalahan kemiskinan tidak terbatas pada faktor-faktor tersebut. Kemiskinan juga diperparah oleh sikap kemalasan, kebiasaan pasrah terhadap nasib, serta kurangnya motivasi berprestasi atau "need of achievement". Kombinasi faktor-faktor ini menyebabkan kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang tumbuh dari nilai, kebiasaan, dan budaya yang salah dalam masyarakat. Kegagalan adaptasi pendatang terhadap kehidupan serta peran keluarga yang kurang optimal dalam menjalankan kewajiban sebagai orang tua juga menjadi faktor munculnya gepeng³.

Kota Bengkulu sebagai ibu kota Provinsi Bengkulu juga tidak luput dari permasalahan ini. Meski memiliki potensi ekonomi dan pariwisata, Kota Bengkulu tercatat memiliki tingkat kemiskinan sebesar 13,8% (Maret 2023), lebih tinggi dari rata-rata nasional⁴. Hal ini diperburuk oleh tingginya laju pertumbuhan penduduk (1,68%), tertinggi di provinsi, yang turut mendorong peningkatan jumlah gepeng. Berdasarkan data Satpol PP Kota Bengkulu, jumlah gepeng meningkat drastis dari 24 orang

¹ 'Kesejahteraan Sosial Di Indonesia Masih Butuh Perhatian Banyak Pihak', 2022, <https://www.kompasiana.com/luthfianurafdhani20214619/62b825bbcf22e337b776bd6/kesejahteraan-sosial-di-indonesia-masih-butuh-perhatian-banyak-pihak>.

² Sutiyo, & Fadhilah, H. A, 2024. *Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.

³ Susanti, R., Pebriyenni, & Muslim, 2016. "Regional Implementation of Regulation No. 1 in 2012 on the Control of Street Children in Padang". *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, vol 5, 2016.

⁴ 'Laju Pertumbuhan Penduduk,2023-2024', accessed 11 November 2024, <https://bengkulu.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE3IzI=/laju-pertumbuhan-penduduk--2024.html>.

pada tahun 2018 menjadi 100 orang pada tahun 2023⁵. Banyak di antaranya merupakan pendatang yang gagal memperoleh pekerjaan layak dan akhirnya bertahan hidup dengan mengemis atau mengamen.

Fenomena ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang memiliki kewenangan dalam menjaga ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum⁶. Penertiban rutin dilakukan di berbagai titik strategis seperti simpang jalan, pasar, taman kota, dan kawasan wisata. Namun, efektivitas penertiban masih rendah karena gepeng kerap kembali ke jalan, menandakan perlunya pendekatan yang lebih holistik, termasuk pembinaan berkelanjutan dan dukungan sosial⁷.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai upaya penertiban gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bengkulu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai strategi penanganan gepeng, tantangan yang dihadapi, serta implikasinya terhadap kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penulis berfokus pada upaya penertiban gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bengkulu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu, jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) di kota ini justru mengalami fluktuasi dan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan lonjakan jumlah gepeng dari 24 orang (2018) menjadi 100 orang (2023), yang menunjukkan bahwa langkah penertiban yang bersifat represif belum mampu menyelesaikan akar permasalahan secara tuntas.

Kesenjangan utama terletak pada kurangnya efektivitas pendekatan jangka panjang dan berkelanjutan. Penertiban yang dilakukan selama ini lebih bersifat reaktif dan temporer, seperti pembinaan singkat, pemulangan ke daerah asal, atau penyerahan ke dinas sosial tanpa strategi integratif yang melibatkan aspek rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pencegahan secara sistemik. Selain itu, minimnya kajian ilmiah dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan serta implementasi penertiban gepeng di Kota Bengkulu menjadikan pemerintah daerah tidak memiliki pijakan yang kuat untuk menyusun program yang tepat sasaran. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan menelaah bagaimana pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP berjalan, apa kendalanya, dan bagaimana solusinya agar dapat menciptakan ketertiban umum yang berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Penertiban Gelandangan dan Pengemis. Penelitian Hariandi Nofanki dan Syamsir berjudul *Penertiban Pengemis dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu* (Hariandi Nofanki & Syamsir, 2022) menemukan bahwa penertiban pengemis dan gelandangan oleh Satpol PP Kota Padang telah sesuai Perda No. 1 Tahun 2012, namun masih menghadapi kendala seperti kurangnya fasilitas, personel, dan masuknya pengemis dari luar kota, sehingga perlu peningkatan koordinasi dan dukungan

⁵ 'Laporan Data Gelandangan Dan Pengemis', Dinas Sosial Kota Bengkulu, accessed 3 November 2024, dinsos.bengkulukota.go.id.

⁶ 'Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum', Pub. L. No. 3 (2008).

⁷ Tinton Irawan, 'Gelandangan Terus Meningkat, Satpol-PP Bengkulu Beri Imbauan', 27 October 2024 <https://www.rri.co.id/bengkulu/daerah/1075133/gelandangan-terus-meningkat-satpol-pp-bengkulu-beri-imbauan>.

infrastruktur⁸. Penelitian I Nyoman Hadi Suharyana, Ni Putu Tirka Widanti, Anak Agung Gede Raka menemukan bahwa penegakan hukum terkait pelanggaran ketertiban umum dalam penertiban Gepeng belum dilaksanakan secara optimal, hal ini disebabkan oleh belum sepenuhnya dilakukan upaya penegakan hukum oleh pemerintah daerah. (I Nyoman Hadi Suharyana, Ni Putu Tirka Widanti, Anak Agung Gede Raka, 2022)⁹. Penelitian Andi Arman Akbar menemukan bahwa Peran Satpol PP di Kota Samarinda dalam penertiban pengemis dan anak jalanan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya personil Satpol PP serta kurangnya anggaran yang tersedia untuk mendukung operasi penertiban pengemis dan anak jalanan tersebut. (Andi Arman Akbar, 2020)¹⁰. Penelitian Roza Erdillah dan Hendry Andry menemukan bahwa Pelaksanaan tugas Satpol PP dalam penertiban Gepeng di Kota Pekanbaru masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari kurangnya tindakan penertiban, seperti razia yang dilakukan berlangsung secara tidak konsisten. Selain itu, proses hukum terhadap individu yang terjaring razia juga kurang tepat. Waktu pelaksanaan razia dan lokasi yang sudah diketahui sebelumnya turut menghambat efektivitas penertiban oleh Satpol PP. (Roza Erdillah & Hendry Andry, 2019)¹¹. Berdasarkan hasil penelitian Zainal Fadri tentang Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta, penulis menemukan Upaya yang tepat dalam penanganan gepeng diharapkan dapat menjadi model untuk penanggulangan masalah serupa di Yogyakarta. Keberhasilan penanganan ini sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta kepedulian terhadap masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. (Zainal Fadri, 2019)¹². Penelitian Yusuf, dkk. menemukan bahwa sekitar 77.500 gelandangan dan pengemis diperkirakan tinggal di kota-kota besar di Indonesia pada tahun 2019. Meskipun pemerintah telah mencoba memberikan solusi melalui implementasi regulasi, pelatihan keterampilan, bantuan sosial-ekonomi, perumahan layak, dan transmigrasi, banyak kebutuhan dasar kelompok marginal ini, seperti akses ke layanan kesehatan dan identitas kewarganegaraan, masih belum terpenuhi. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan regulasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan layanan hak dasar bagi kelompok gelandangan dan pengemis. (Yusuf, dkk, 2020)¹³.

⁸ Hariandi Nofanki and Syamsir Syamsir, 'Penertiban Pengemis Dan Gelandangan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang', *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies* 1, no. 3 (31 October 2022): 212–17

⁹ I Nyoman Hadi Suharyana, Ni Putu Tirka Widanti, and Anak Agung Gede Raka, 'Implementasi Kebijakan Penertiban Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung', *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)* 2, no. 1 (12 July 2022): 1–5

¹⁰ Andi Arman Akbar, 'Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Samarinda' 8, no. 3 (2020): 871–82.

¹¹ Roza Erdillah et al., 'Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru', *Roza Erdillah PUBLIKa*, vol. 1, 2015.

¹² *Jurnal Pengembangan, Masyarakat Islam, and Zainal Fadri*, 'Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Di Yogyakarta', *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol. 10, 2019.

¹³ Yusuf, H., Setiawan, H. H., Ganti, M., Wismayanti, Y. F., Susantyo, B., Nurhayu, I., Konita, I., Budiarti, M., & Sulubere, M. B, 2022. "Access to basic needs for marginalized groups in Indonesia: A case study of the homeless and beggars". In *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences (ICOSI-HESS 2022)* (*Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 661, pp. 237-245). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_25

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti aspek regulasi, kendala operasional, dan belum optimalnya penegakan hukum dalam penertiban gelandangan dan pengemis (Gepeng), penelitian ini menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengkaji secara mendalam implementasi penertiban oleh Satpol PP Kota Bengkulu, serta respons dari masyarakat dan pihak gepeng sendiri. Penelitian ini juga menonjolkan pentingnya pendekatan humanis berbasis pembinaan dan pemberdayaan sebagai strategi berkelanjutan, serta menekankan sinergi antara aparat, masyarakat, dan program sosial sebagai faktor kunci keberhasilan. Temuan ini memperkaya literatur sebelumnya dengan menambahkan dimensi empatik, sosial, dan edukatif dalam kebijakan penertiban gepeng, sekaligus menunjukkan efektivitas praktik di lapangan dalam konteks lokal Kota Bengkulu.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menurut Simangunsong. Dimana pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menggali makna, pola, serta proses yang dialami langsung oleh subjek dalam konteks alaminya. Dalam metode ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, menggunakan teknik seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, data dianalisis secara induktif guna menghasilkan gambaran menyeluruh tanpa bergantung pada analisis statistik yang kaku¹⁴.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kasi Operasi dan Pengendalian, Masyarakat Kota Bengkulu sebanyak 3 orang, dan masyarakat (dalam hal ini masyarakat yang berada di wilayah area rawan Gepeng sebanyak 3 orang).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan menggunakan teori penertiban Eviany & Sutiyo, penertiban merupakan serangkaian prosedur atau langkah yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah serta kepatuhan yang berlaku. Penertiban terdiri dari tiga dimensi meliputi tindakan upaya langsung maupun tidak langsung, alat yang digunakan berupa peraturan atau aturan dengan aparat penertiban, dan tujuan penertiban yang mencakup terciptanya keteraturan dan kepatuhan¹⁵. Penelitian ini akan dibahas dan dijelaskan dalam tiga rumusan masalah yang akan dijelaskan sebagai berikut.

¹⁴ Simangunsong, F, 2018. *Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta

¹⁵Eviany & Sutiyo. 2023. *Perlindungan Masyarakat, Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Manajemen Kebencanaan*. Nasmedia.

3.1 Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bengkulu

Penertiban gelandangan dan pengemis (gepeng) yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bengkulu menggunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung ini meliputi langkah-langkah strategis seperti pemetaan lokasi yang dianggap rawan aktivitas gepeng, pembentukan tim operasi khusus, hingga pendekatan persuasif untuk memberikan peringatan dan edukasi kepada para gepeng. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, Satpol PP dapat mengambil tindakan represif secara terukur. Seluruh proses ini dilakukan dengan tetap menjaga prinsip kemanusiaan dan berlandaskan pada peraturan daerah serta standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pendekatan tidak langsung lebih berfokus pada pencegahan dan edukasi, termasuk sosialisasi terkait Peraturan Daerah yang mengatur larangan pemberian uang langsung kepada gepeng, serta kampanye yang melibatkan berbagai instansi, seperti Dinas Sosial. Langkah ini bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar tidak secara langsung memberi bantuan kepada gepeng yang justru dapat memperpanjang ketergantungan mereka pada belas kasihan publik. Meskipun pendekatan ini cukup efektif dalam menurunkan jumlah gepeng yang aktif di ruang publik, ada kendala dalam hal jangkauan informasi. Pemanfaatan media massa dan teknologi digital sebagai sarana sosialisasi masih belum optimal sehingga informasi penting ini belum tersampaikan secara menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat.

Penertiban ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada sejumlah regulasi penting, di antaranya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, serta Permendagri Nomor 16 Tahun 2023. Regulasi-regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat sehingga setiap tindakan penertiban tetap menghormati hak asasi manusia dan berorientasi pada solusi sosial, bukan sekadar tindakan represif semata.

Dari sisi fasilitas dan dukungan teknis, Satpol PP Kota Bengkulu memiliki sarana yang memadai, mulai dari kendaraan operasional, alat komunikasi, dokumen administrasi, hingga rumah singgah sementara yang disiapkan sebagai tempat penampungan sementara para gepeng. Fasilitas ini sangat penting untuk memastikan proses penertiban berjalan dengan koordinasi yang baik, profesional, dan tetap berlandaskan kemanusiaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

Keberhasilan penertiban juga sangat bergantung pada kesiapan dan kompetensi aparat yang bertugas. Para petugas Satpol PP dilengkapi dengan pelatihan intensif yang meliputi aspek hukum, prosedur teknis penertiban, serta kemampuan komunikasi empatik agar mereka mampu menjalankan tugas tanpa merendahkan martabat para gepeng. Pendekatan humanis seperti ini turut memperkuat citra Satpol PP sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan ketertiban, tetapi juga peduli terhadap solusi sosial jangka panjang.

Tujuan utama dari kegiatan penertiban ini adalah untuk menciptakan ketertiban umum sekaligus memberikan solusi sosial kepada gepeng melalui program pembinaan dan pemberdayaan agar mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Meskipun telah terjadi kemajuan, terutama di beberapa titik rawan, masih terdapat kendala berupa simpati masyarakat yang kadang menghambat pelaksanaan penertiban dan faktor ekonomi yang membuat para gepeng sulit meninggalkan ruang publik. Oleh karena itu, keberlanjutan program serta peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan agar hasil penertiban lebih optimal dan berkelanjutan.

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penertiban Gelandangan dan Pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Keberhasilan pelaksanaan penertiban gepeng di Kota Bengkulu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendukung maupun menghambat efektivitas program. Faktor pendukung utama yang signifikan adalah adanya dukungan dari pemerintah daerah yang diwujudkan melalui regulasi yang jelas dan ketersediaan anggaran yang memadai untuk operasional Satpol PP dan instansi terkait. Dukungan ini memungkinkan pelaksanaan penertiban berjalan sesuai peraturan dan dengan sumber daya yang cukup.

Selain itu, koordinasi yang baik antara Satpol PP, Dinas Sosial, kepolisian, dan instansi lain sangat penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan penertiban, pembinaan, dan rehabilitasi para gepeng. Faktor lain yang mendukung adalah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan uang atau bantuan secara langsung kepada gelandangan dan pengemis, yang menjadi salah satu kunci untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap pemberian belas kasihan dari publik.

Namun, di samping faktor pendukung tersebut, ada pula sejumlah kendala yang menjadi penghambat dalam proses penertiban. Salah satu kendala utama adalah masih adanya sebagian masyarakat yang tidak mematuhi larangan memberi uang langsung kepada gepeng, yang menyebabkan aktivitas gepeng sulit diminimalkan secara signifikan. Selanjutnya, keterbatasan fasilitas penampungan sementara menjadi masalah serius, karena jumlah tempat yang tersedia tidak cukup untuk menampung semua gepeng yang tertangkap saat operasi penertiban, sehingga membatasi efektivitas rehabilitasi dan pembinaan.

Tidak kalah penting, keberadaan gepeng dari luar daerah juga menimbulkan tantangan tersendiri. Gepeng luar daerah seringkali tidak memiliki akses atau koordinasi dengan pemerintah daerah asalnya, sehingga proses pemulangan dan pembinaan jangka panjang menjadi lebih rumit. Kondisi ini membutuhkan strategi lintas wilayah dan kerjasama antar pemerintah daerah yang lebih kuat.

Oleh karena itu, untuk mencapai hasil penertiban yang lebih optimal, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang mampu mengatasi hambatan tersebut, termasuk memperluas fasilitas penampungan, meningkatkan edukasi masyarakat, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dan lintas daerah agar kesejahteraan sosial masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

3.3 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Hambatan Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Bengkulu

Dalam menghadapi berbagai hambatan yang menghambat efektivitas penertiban gepeng, Satpol PP Kota Bengkulu telah melaksanakan sejumlah upaya strategis. Pertama, Satpol PP secara intensif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan tujuan utama mengubah pola pikir masyarakat terkait kebiasaan memberikan uang langsung kepada gepeng. Masyarakat diarahkan agar menyalurkan bantuan sosial melalui lembaga resmi agar pemberian bantuan dapat lebih terkontrol dan berdampak positif jangka panjang bagi penerima.

Kedua, Satpol PP bekerjasama erat dengan Dinas Sosial untuk memberikan pembinaan kepada gepeng yang sudah ditertibkan, berupa pelatihan keterampilan kerja dan pendampingan psikologis. Langkah ini bertujuan memberikan solusi yang lebih berkelanjutan, sehingga para gepeng memiliki kemampuan dan dukungan untuk mengubah kondisi sosial-ekonominya secara mandiri.

Ketiga, untuk mencegah para gepeng kembali ke jalan dan mengantisipasi kedatangan gepeng dari luar daerah, Satpol PP melakukan pengawasan yang ketat melalui patroli rutin di lokasi-lokasi

strategis yang rawan aktivitas gepeng. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban di ruang publik dan mengurangi keberadaan gepeng yang berpotensi menimbulkan gangguan.

Keempat, Satpol PP juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah asal para gepeng dari luar daerah. Upaya ini dilakukan agar para gepeng dapat dipulangkan ke daerah asal masing-masing dan mendapatkan pembinaan yang sesuai di tempat mereka berasal, sehingga penanganan dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Semua strategi ini hanya bisa berjalan dengan baik apabila didukung oleh partisipasi aktif masyarakat serta sinergi yang solid antara pemerintah daerah, Satpol PP, Dinas Sosial, dan lembaga terkait lainnya. Dengan kolaborasi yang erat, lingkungan yang lebih tertib, aman, dan sejahtera diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP Kota Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, serupa dengan temuan Hariandi Nofanki dan Syamsir (2022) yang menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas dan personel. Pendekatan penertiban yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga humanis melalui program pembinaan dan pemberdayaan, sejalan dengan rekomendasi penelitian Zainal Fadri (2019) yang menekankan perlunya dukungan sosial sebagai bagian dari penanganan masalah sosial tersebut. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam mengurangi keberadaan gelandangan dan pengemis di ruang publik sekaligus membuka peluang perbaikan kondisi sosial-ekonomi mereka secara mandiri.

Respon masyarakat terhadap kebijakan ini umumnya positif, terutama terkait kepatuhan terhadap larangan pemberian uang atau makanan secara langsung kepada gelandangan dan pengemis. Namun, sikap ambivalen masyarakat yang masih memberikan bantuan secara informal mencerminkan tantangan dalam pelaksanaan regulasi yang juga ditemukan oleh Roza Erdillah dan Hendry Andry (2019), yaitu kurangnya konsistensi dan edukasi dalam penertiban. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif untuk memperkuat pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan penertiban.

Dari sisi gelandangan dan pengemis, kendala utama yang masih menjadi penghambat adalah faktor ekonomi, yang menyebabkan mereka tetap berada di ruang publik meski mengetahui larangan, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Andi Arman Akbar (2020) yang menyoroti keterbatasan dukungan pemerintah dalam operasional penertiban. Temuan ini menegaskan bahwa penertiban tanpa pembinaan dan pemberdayaan yang memadai belum mampu menyelesaikan akar permasalahan secara menyeluruh.

Secara umum, penertiban yang dilakukan telah menunjukkan kemajuan signifikan, ditandai dengan berkurangnya aktivitas gelandangan dan pengemis di beberapa lokasi strategis serta meningkatnya ketertiban dan kenyamanan publik. Namun, kemunculan kembali gelandangan dan pengemis di beberapa titik mengindikasikan perlunya konsistensi pelaksanaan dan partisipasi aktif masyarakat, yang juga menjadi tantangan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara penegakan hukum, pembinaan sosial, dan keterlibatan masyarakat sebagai kunci keberlanjutan penanganan masalah gelandangan dan pengemis secara humanis dan efektif.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satpol PP tidak hanya terbatas pada penegakan ketertiban, tetapi juga melibatkan pembinaan sosial secara humanis. Masyarakat cenderung memiliki sikap yang ambivalen; meskipun mendukung penertiban, masih terdapat

kebiasaan memberikan bantuan secara informal kepada gelandangan dan pengemis. Faktor ekonomi menjadi kendala utama yang menghambat upaya pengentasan secara menyeluruh. Selain itu, konsistensi dalam penegakan aturan dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan karena keberadaan gelandangan dan pengemis masih muncul kembali di beberapa lokasi. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan penertiban ini.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP Kota Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku, dengan pendekatan yang mengedepankan aspek humanis melalui program pembinaan dan pemberdayaan. Pendekatan tersebut efektif dalam mengurangi keberadaan gelandangan dan pengemis di ruang publik serta memberikan peluang bagi mereka untuk meningkatkan kondisi sosial-ekonomi secara mandiri. Respon masyarakat terhadap kebijakan ini umumnya positif, meskipun terdapat sikap ambivalen terkait bantuan informal yang masih diberikan, sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi lebih intensif. Faktor ekonomi tetap menjadi kendala utama bagi gelandangan dan pengemis untuk meninggalkan kehidupan di jalan. Keberlanjutan penertiban memerlukan konsistensi pemerintah dan keterlibatan aktif masyarakat agar permasalahan dapat ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan. Sinergi antara penegakan hukum, pembinaan sosial, dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam mewujudkan ketertiban yang humanis dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni terbatas pada wilayah Kota Bengkulu dengan pendekatan kualitatif yang subjektif serta keterbatasan waktu dan akses data sehingga temuan tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat mengkaji efektivitas program pembinaan gelandangan dan pengemis dengan pendekatan kuantitatif serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk hasil yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. A. (2020). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda. *Jurnal XYZ*, 8(3), 871–882.
- Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, (2024). Laju pertumbuhan penduduk, 2023-2024. <https://bengkulu.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE3IZI=/laju-pertumbuhan-penduduk--2024.html>
- Dinas Sosial Kota Bengkulu, (2024). *Laporan data gelandangan dan pengemis*. <https://dinsos.bengkulukota.go.id>

- Erdillah, R., & Hendry, A. M. (2015). Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. *Roza Erdillah Publika*, 1.
- Eviany, & Sutiyo. (2023). *Perlindungan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan*. Nasmedia.
- Luthfianurafdhani. (2022). *Kesejahteraan sosial di Indonesia masih butuh perhatian banyak pihak*. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/luthfianurafdhani20214619/62b825bbcf22e337b776bd6/kesejahteraan-sosial-di-indonesia-masih-butuh-perhatian-banyak-pihak>
- Nofanki, H., & Syamsir, S. (2022). Penertiban pengemis dan gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 1(3).
- Pemerintah Kota Bengkulu. (2008). Peraturan Daerah Kota Bengkulu tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Perda No. 3 Tahun 2008).
- Pengembangan, J. M., & Fadri, Z. (2019). Upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis (Gepeng) sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Yogyakarta. *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10.
- RRI.co.id, 2024 Gelandangan terus meningkat, Satpol-PP Bengkulu beri imbauan. <https://www.rri.co.id/bengkulu/daerah/1075133/gelandangan-terus-meningkat-satpol-pp-bengkulu-beri-imbauan>
- Simangunsong, F. (2018). *Metode penelitian ilmu pemerintahan*. Alfabeta.
- Suharyana, I. N. H., Widanti, N. P. T., & Raka, A. A. G. (2022). Implementasi kebijakan penertiban gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 2(1).
- Susanti, R., Pebriyenni, & Muslim. (2016). *Regional implementation of Regulation No. 1 in 2012 on the control of street children in Padang*. *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 5.
- Sutiyo, & Fadhilah, H. A. (2024). *Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Yusuf, H., Setiawan, H. H., Ganti, M., Wismayanti, Y. F., Susantyo, B., Nurhayu, I., Konita, I., Budiarti, M., & Sulubere, M. B. (2022). Access to basic needs for marginalized groups in Indonesia: A case study of the homeless and beggars. In *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences*. (ICOSI HESS 2022) (Vol. 661, pp. 237–245). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_25